

Model Karakter Nasionalisme Keindonesiaan Mantan Pemuda Separatis Di Aceh Utara

Fakhrurrazi

Arief Rahman

(Dosen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe-Aceh, Indonesia)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh suatu pemahaman yang utuh tentang mengapa nasionalisme keindonesiaan dikalangan mantan pemuda seperatis di Aceh Utara yang pada era konflik sangat resisten terhadap Indonesia namun setelah perdamaian tercipta berubah menjadi nasionalistik. Dimensi sosial apa saja yang mendorong terjadinya perubahan sikap mantan pemuda seperatis Aceh Utara terhadap nasionalisme keindonesiaan menjadi fokus khusus dari penelitian ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Sementara untuk memperoleh data sebagai basis analisis dalam memperoleh temuan-temuan dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Setelah proses penelitian dilakukan, studi ini menemukan bahwa nasionalisme keindonesiaan pemuda Aceh Utara terhadap Indonesia pada dasarnya cukup baik. Pada tahun 1945 mereka secara heroik bersama Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Hasan Di Tiro bahu membahu melakukan Indonesianisasi Aceh. berhadapan dengan situasi sosial dan pembangunan yang tertinggal dan porak-poranda pasca perang dengan Belanda dan Jepang, maka pandangan visioner Presiden Soekarno yang berikrar akan membawa Indonesia dalam kedudukan sebagai bangsa besar yang sejahtera dan berperadaban tinggi didunia menjadi alasan substantif dibalik tumbuh suburnya nasionalisme pemuda dan masyarakat umumnya di Aceh Utara. Namun, berbilang waktu dalam perjalanan menjadi Indonesia, masyarakat Aceh Utara mengalami dan merasakan keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno doeloe. Eksploitasi besar-besaran “perut bumi” Aceh Utara yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sejak 1976 bukannya merubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik, yang terjadi justeru melebarnya segregasi sosial akibat massifnya penduduk miskin disatu sisi dan minoritasnya yang dapat memperoleh keuntungan dari eksploitas migas di tanah mereka. Pada dimensi lain perlakuan sosial-politik yang menafikan nilai-nilai kearifan lokal dirasakan telah mencabut identitas orang Aceh Utara. Realitas inilah

yang kemudian melahirkan resistensi terhadap nasionalisme Indonesia. Sehingga dalam konflik pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mereka bergabung kedalam kelompok perjuangan ini. Namun, seiring dengan tumbuhnya rasa nyaman, meningkatnya kesejahteraan dan penghargaan terhadap identitas kearifan lokal masyarakat Aceh Utara yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan korektif masa lalu oleh pemerintah Indonesia di era pasca damai, rasa kecintaan (nasionalisme) pemuda Aceh Utara terhadap Indonesia mulai tumbuh kembali.

Kata Kunci: Karakter Nasionalisme, Mantan Pemuda Seperatis, Aceh Utara

PENDAHULUAN

Teoritis nasionalisme terkemuka Perancis, Abbe Sieyes menulis, bahwa bangsa mendahului segala sesuatu. Kehendak bangsa selalu absah dan bangsa adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, negara bangsa (*nation state*) adalah satu-satunya unit politik yang sah sebagai penjaga identitas bangsa (Ian Adams, 2004: 122). Dengan demikian, kecintaan rakyat terhadap perasaan kebangsaan yang dalam terminologi teoritik keilmuan sosial disebut dengan nasionalisme mendasari eksistensi suatu negara bangsa. Pada sisi inilah antara nasionalisme dan negara bangsa merupakan

pasangan yang integral dan tidak terpisahkan.

Namun, nasionalisme sebagai perasaan kecintaan terhadap kebangsaan yang terbentuk secara sosial dalam tataran empiris, ia tidak sekali jadi dan berdiri kokoh secara statis melainkan cenderung bersifat dinamis atau mengalami pasang surut (Nicholas Aberchrombie, 2010: 366). Realitas ini antara lain terefleksikan pada karakter nasionalisme keindonesiaan mantan pemuda Aceh khususnya di kabupaten Aceh Utara. Dalam rentang konflik panjang antara pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang terpentaskan dari tahun 1976 sampai dengan 2005 di daerah

yang menjadi salah satu pusat dari konflik utama di Aceh ini para pemudanya menunjukkan resistensi yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang berbau Indonesia.

Sebaliknya, mereka menunjukkan antusiasme yang sangat kental dan dominan terhadap perlawanan yang dilakukan oleh GAM terhadap pemerintah Indonesia. Kecintaan terhadap GAM mereka tunjukkan melalui dukungan terhadap organisasi separatis itu. Bentuk dukungan ditunjukkan antara lain melalui dukungan logistik perang, antusias dan siap dimobilisasi oleh GAM untuk pelbagai kepentingan politik baik dalam bentuk pengumpulan massa, intelijen maupun propaganda. Di era konflik, sikap inilah yang menyebabkan mereka disebut sebagai pemuda seperatis. Sementara perlawanan terhadap nasionalisme keindonesiaan mereka tunjukkan antara lain

melalui minimnya partisipasi pada aktivitas ritual keindonesiaan seperti peringatan proklamasi kemerdekaan dan minimnya partisipasi politik dalam pemilihan umum.

Resistensi terhadap nasionalisme keindonesiaan bertambah transparan melalui penabalan sebutan Si PAI (Pendusta Agama Islam) terhadap semua aparatur pemerintahan di Aceh baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun TNI/Polri. Sebutan ini adalah sebutan sinisme dan memposisikan aparatur pemerintahan Indonesia sebagai lawan atau musuh dari masyarakat Aceh. Namun, setelah 7 tahun perdamaian berhasil di wujudkan di Aceh melalui MOU Helsinki 15 Agustus 2005 perasaan nasionalisme keindonesiaan para pemuda di kabupaten Aceh Utara tampak mulai mekar dan bersemi kembali. Hal itu tercermin tidak hanya pada maraknya pemuda yang memakai kaos tim sepakbola

nasional Indonesia yang berlabel Garuda tetapi juga mulai antusiasnya mereka mengikuti ritual upacara kemerdekaan 17 Agustus, tingginya partisipasi politik dalam Pemilu dan Pemilukada dan mulai hilangnya sebutan si Pai terhadap aparat pemerintah Indonesia di Aceh.

Realitas ini secara akademik menggugah pertanyaan mengapa perasaan nasionalisme keindonesiaan mantan pemuda seperatis di Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya sangat rendah dan cenderung apatis serta sinis terhadap sesuatu yang bersimbol keindonesiaan kini berubah secara lambat laun menjadi kecintaan?. Bagaimana karakter nasionalisme keindonesiaan mantan pemuda separatis di kabupaten Aceh Utara ini sesungguhnya?. Kenyataan ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut khususnya untuk memahami bagaimana karakter dan perubahan nasionalisme keindonesiaan para mantan

pemuda seperatis khususnya di kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini bertujuan menemukan model nasionalisme keindonesiaan yang mengalami pasang surut dikalangan para pemuda mantan seperatis seperti di Aceh Utara, merupakan suatu karakter nasionalisme yang sangat spesifik di Indonesia selain Papua dan Ambon. Karena itu, studi ini signifikan dilakukan untuk mengkaji dan memahami karakter nasionalisme dikalangan para pemuda Indonesia yang sebelumnya pro terhadap gerakan seperatis namun setelah beberapa tahun perdamaian berhasil tercipta dan mengalami kestabilan, nasionalisme keindonesiaan pun tumbuh dan bersemi. Bukan mustahil temuan studi ini meskipun disadari memiliki kekhasan tersendiri akibat perbedaan konstruk sosio-kultural memiliki relevansi untuk memahami konstruksi nasionalisme masyarakat Indonesia lainnya yang bertipologi

“kritis” semisal Papua dan Ambon.

Kajian Teoritis

Nasionalisme dalam perspektif Stanley Benn terdapat lima unsur, pertama, semangat ketaatan kepada suatu bangsa, kedua, dalam aplikasinya kepada politik, nasionalisme menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri khususnya jika kepentingan bangsa sendiri berlawanan dengan kepentingan bangsa lain. Ketiga, sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa dan Karena itu, keempat, doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa dipertahankan dan kelima, nasionalisme adalah suatu teori politik yang menekankan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota

bangsa itu, Nurcholish Madjid, (2001: 37).

Jadi nasionalisme adalah sesuatu yang lahir dari proses sejarah yang panjang dalam suatu bangsa. Bukan suatu kebetulan atau bikinan elite-elite tertentu seperti yang dicetuskan oleh Gellner. Ernest Gellner (1983) menyebutkan bahwa nasionalisme pada dasarnya hanya sebuah kebetulan, sebuah kecelakaan. Kebutuhannya tergantung dengan tempat dan waktu yang melingkupinya. Ada pola keterpengaruhan yang terus-menerus membentuk kesadaran nasionalisme sebuah masyarakat yang itu dapat berasal dari apa saja dan dimana saja.

Nasionalisme Indonesia jelas merupakan sesuatu yang lahir sebagai produk kesadaran sejarah komponen bangsa bukan kebetulan atau bikinan sesaat. Tidak karena dominasi etnik tertentu tetapi kemauan nasional yang berangkat dari kesadaran senasib dan sebangsa.

Onghokham (1987) menegaskan bahwa pembentukan Hindia Belanda ke Indonesia tidak berasal dari superioritas etnik tertentu, tapi dianggap pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh etnik untuk merdeka dan merumuskan nasionalisme Indonesia. Inilah proses pembentukan nasionalisme modern Indonesia. Tidak diawali oleh kekalahan Belanda pada tahun 1942 tapi jauh sebelum itu ketika gerakan kebangkitan nasional mulai marak di tahun 1920-an hingga 1930-an.

Karena terbentuk sebagai kesadaran bersama maka nasionalisme keindonesian merupakan suatu refleksi kecintaan seluruh komponen bangsa yang sangat beragam secara etnik ini terhadap bangsanya. Pada posisi inilah maka nasionalisme yang dibangun sebagai suatu kerjasama antar komponen bangsa sebagaimana nasionalisme Indonesia menuntut pemberian rasa adil kepada seluruh komponen tersebut dalam

pelbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin negara. Jika tidak seperti yang ditegaskan oleh James C. Scotts (1990) masyarakat yang berada dalam tekanan akan mengubah pengalaman kekerasannya itu sebagai sebuah fakta dan berdasarkan metodologi praktis individualismenya dikembangkan menjadi sebuah tuntutan. Hal ini akan menguncang rasa nasionalisme nasional suatu masyarakat.

Karakter nasionalisme tidak bersifat statis tetapi dinamis atau mengalami pasang surut. Sebab nasionalisme sebagaimana halnya negara bangsa dan identitas nasional sebagai bentuk kolektif organisasi dan identifikasi bukanlah fenomena yang terjadi “secara alamiah” melainkan bangunan sosial, kultural dan historis yang tidak tentu. Negara bangsa adalah konsep politis yang mengacu pada aparat administratif yang dipercaya memiliki kedaulatan atas kawasan atau

wilayah tertentu dalam sistem negara bangsa.

Sementara identitas nasional adalah bentuk identifikasi imajinatif terhadap simbol dan diskursus negara bangsa. Jadi, bangsa dan juga nasionalisme bukan hanya sekedar bangunan politis melainkan sistem representasi budaya dimana identitas nasional terus menerus direproduksi sebagai tindakan diskursif. Negara bangsa sebagai aparatur politik dan bentuk simbolis mengandung dimensi temporer dimana struktur politik melanggengkan dan mengubah ketika dimensi simbolis dan diskursif identitas nasional mengisahkan dan menciptakan gagasan tentang asal-usul, kontinuitas dan tradisi, (Chris Barker, 2005 :203)

Perasaan kebersamaan dalam sebuah negara bangsa yang terikat dalam nasionalisme merupakan sesuatu yang harus dipelihara oleh para pemimpin politik melalui kebijakan-

kebijakan yang tidak diskriminatif. Apabila suatu komunitas etnis sebagai bagian integral dari suatu negara bangsa merasa diperlakukan tidak adil, maka yang kemudian lahir adalah perubahan nasionalisme dari nasionalisme nasional menjadi nasionalisme etnis. Kemudian nasionalisme ini justru menjadi instrumen menggerakkan konflik dan kekerasan yang hampir tidak berakhir, (Ians Adam, 1993 : 154). Pasang surut rasa nasionalisme terkait erat dengan perasaan diperlakukan secara adil atau tidak suatu komunitas dalam sebuah bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha melukiskan peristiwa, memahami dan menangkap makna nasionalisme keindonesiaan dikalangan mantan pemuda seperatis di Aceh Utara yang pada era konflik sangat resisten terhadap Indonesia namun setelah

perdamaian tercipta berubah menjadi nasionalistik. Pemahaman ini dibangun dari sudut pandang dan penghayatan pemuda mantan pemuda Separatis sendiri. Sebab itu, perspektif yang digunakan dalam memahami fenomena dalam studi ini adalah perspektif etnografi. Metode etnografi yang digunakan dalam studi ini adalah metode etnografi kognitif sebagaimana yang dikonstruksikan oleh Spradley. Berbeda dengan etnografi modern yang memandang bentuk sosial dan budaya (pemahaman) masyarakat dibangun dan dideskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti. Maka, dalam etnografi kognitif bentuk tersebut dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran (*mind*) anggota masyarakat tersebut dan tugas sang peneliti adalah menggali agar keluar dari pikiran mereka. Untuk menggali suatu pemahaman sosial yang ada dipikiran suatu komunitas, maka seorang peneliti etnografi harus

memahami simbolisasi pikiran mereka itu dari bahasa yang mereka ungkapkan baik implisit maupun eksplisit, baik melalui perkataan dalam komentar sederhana maupun dalam wawancara yang panjang (James P. Spradley, 2006: xii).

Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena sinisme dan memosisikan aparat pemerintah Indonesia sebagai lawan atau musuh dari masyarakat Aceh. Namun, setelah 11 tahun perdamaian berhasil di wujudkan di Aceh melalui MOU Helsinki 15 Agustus 2005 perasaan nasionalisme keindonesiaan para pemuda di kabupaten Aceh Utara tampak mulai mekar dan bersemi kembali.

Informan Penelitian

Informan penelitian dalam studi ini dipilih berdasarkan posisi dominan mereka dalam struktur GAM. Mereka itu adalah masyarakat dan mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka, Panglima Sagoe, Petinggi GAM dan dan Pimpinan Partai Aceh (PA) serta pemerintahan kabupaten yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dan Guncangan Nasionalisme Keindonesiaan Pemuda Aceh Utara

Konstruksi nasionalisme keindonesian pemuda Aceh Utara tidak terlepas dari realitas dinamika konflik yang dialami dan diaktori oleh mereka sepanjang era Orde Baru hingga dengan paruh awal era reformasi (1976-2005). Realitasnya, tidak dapat dipungkiri perlawanan terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh sebagian pemuda Aceh Utara secara fundamental

telah membentuk karakter nasionalisme keindonesiaan mereka. Tidak terhindarkan bahwa hidup dalam pusaran horor, teror dan pelbagai bentuk kekerasan militeristik melahirkan pelbagai persepsi negatif terhadap keindonesiaan.

Pokok persoalan pengerasan perasaan “benci” terhadap Indonesia dikalangan pemuda Aceh Utara pada era Orde Baru terletak pada pola pendekatan penanganan konflik yang mengabaikan pendekatan dialogis. Pemerintahan Orde Baru dibawah kendali rezim Soeharto mengedepankan pendekatan militeristik yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya jatuh korban dipihak masyarakat sipil. Realitas ini mendasari akar runtuhnya nasionalisme keindonesian pemuda Aceh Utara bahkan seperti yang diungkapkan oleh Ramli, mereka secara kolektif akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perlawanan Gerakan Aceh

Merdeka (GAM) terhadap pemerintah Indonesia¹¹.

Konflik ini pada awalnya dipicu oleh sikap "lupa" (tidak menggubris) Orde Baru terhadap posisi konstitusional Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang secara tegas melalui Surat Keputusan Perdana Menteri RI Tanggal 2 Agustus 1959 No. 1/Missi/1959 disebutkan sebagai daerah khusus yang memiliki keistimewaan dan otonomi yang luas dalam bidang Agama (syari'at Islam), Pendidikan dan Adat (*customary*) (Hardi, 1959: 178). Orde Baru menganggap "tidak ada" landasan konstitusional keistimewaan pemerintahan Aceh itu karena tidak pernah dituangkan dalam undang-undang (Nirzalin, 2012: 376), sehingga dalam praktik tata kelola pemerintahan rezim Orde Baru menyamaratakan perlakuan

terhadap daerah Aceh dengan daerah lainnya di Indonesia. Padahal sah diketahui publik Aceh, surat keputusan keistimewaan Aceh tersebut lahir sebagai resolusi konflik antara RI dan DI/TII Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh di era Orde Lama (1956-1962).

Di sisi lain, dengan kacamata paradigma developmentalisme yang diusungnya Ibrahim Hasan (Gubernur dan arsitek pemerintah Orde Baru di Aceh) merasa pembangunan yang telah digalakkannya di Aceh telah menunjukkan keberhasilan yang spektakuler. Baginya, pengabaian terhadap realisasi keistimewaan konstitusional Aceh itu tidak akan menjadi soal, toh rakyat Aceh akan "melupakannya" jika kesejahteraan ekonomi mereka dapat diwujudkan. Semakin intensifnya industrialisasi dan keberhasilannya memenangkan Golkar yang berdampak pada

¹ Wawancara dengan Ramli Pemuda Blang Poroh Aceh Utara, 13 April 2016

membesarnya curahan dana pembangunan Aceh dari APBN (Pemerintah Pusat) dari 80 milyar menjadi 600 milyar per tahun telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang mencapai 7 % per tahunnya (Heri Iskandar, et.al, 2001: 287).

Ibrahim Hasan dan pemerintah Orde Baru itu seolah-olah lupa bahwa praktik pemerintahan Orde Baru yang represif, korup, kolusi, nepotisme, pertumbuhan ekonomi yang justeru melahirkan ketimpangan sosial yang tinggi, sekuler dan melupakan syari'at Islam yang menjadi bagian substansial dari kesediaan pihak DI/TII pada tahun 1962 berdamai dengan pemerintahan Soekarno diawasi dan lalu dinilai oleh salah satu pemimpin kharismatik Aceh dan agen (aktor) utama dari peristiwa itu Teungku Muhammad Daud Beureueh. Menurut Abu Beureueh kesemuanya (praktik pemerintahan Orde Baru di Aceh) itu merupakan pelecehan besar

terhadap orang Aceh. Menurutnya, Soeharto dan Soekarno tidak ada bedanya (Neta S. Pane, 2001: 30).

Kecewa dan sakit hati dengan praktik kekuasaan Orde Baru itu mendorong yang terakhir menggalang kekuatan dan melakukan perlawanan kembali terhadap pemerintah Indonesia. Hal itu bersama dengan mantan veteran DI/TII yang tidak lain adalah para mantan anak buahnya dahulu seperti Teungku Ilyas Leubee. Teungku Hasbi Geudoeng, Teugku Yusuf Hasan, Teungku Jamil Syamsuddin, Ayah Sabi, Uzir Jaelani, Teungku Muhammad Yunus Kembang Tanjung dan Teungku Zaenal Abidin diwujudkan dengan mendukung perlawanan Gerakan Aceh Merdeka yang diproklamirkan oleh anak ideologisnya di PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dahulu, Hasan Tiro (Nirzalin, 2012: 376).

Menurut Amir Rasyid, Abu Daud Beureueh mendukung Hasan Tiro untuk melawan pemerintah Orde Baru selain karena alasan dialah yang paling potensial juga karena ia merasa sudah terlalu tua untuk memimpin perjuangan sebesar itu. Ia mengatakan: *"Beureueh felt he wastoo old to do much, but endorsed di Tiro to take his place at the head of a new struggle"* (Antony Reid, 2008: 184). Dukungan itu benar-benar diwujudkan oleh Abu Beureueh pada Hasan Tiro.

Ketika Hasan Tiro pulang ke Aceh pada tahun 1974 dan 1975 yang terakhir menemui Abu dan Abu Beureueh mengatakan pada Hasan Tiro pada pertemuan itu: *"Loen Toean Jeok Seugala JiebKen Gata. Aceh Lam Jaroe Gata Jinoe. Peu Gent. Loen Toean Toeloeng Gata"*. (*I give everything to you". Aceh is in your hands now. Do it, I will help you*)(Antony Reid, 2008: 185).

Pernyataan Abu Beureueh ini menebalkan keyakinan Hasan Tiro, bahwa gerakan yang akan dilakukannya akan mendapat

dukungan luas dari masyarakat Aceh. Sebab Abu Beureueh merupakan ulama pejuang yang dihormati dan kharismatik di Aceh. Tingkatan kharismatiknya Abu Beureueh bagi masyarakat Aceh setara dengan kharismatiknya Soekarno bagi masyarakat Indonesia. Maka, tatkala Abu Beureueh menyatakan dukungannya terhadap perjuangan yang akan dilakukannya semua keraguan Hasan Tiro hilang. Dengan penuh kegembiraan yang tergambar dari senyumannya yang mengembang Hasan Tiro pulang kerumah, lalu mempertimbangkan waktu yang momentum yang baik untuk mendeklarasikan gerakan kemerdekaan Aceh dari Indonesia.

Nihilisasi Nasionalisme Indonesia Dan Renasionalisasi Nasionalisme Aceh

Atas dukungan dari Abu Beureuh dan mantan seniorinya di DI/TII itu, lalu Hasan Tiro

melakukan deklarasi berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976

di bukit Halimun, Tiro Kabupaten Pidie. Deklarasi itu dilakukan dalam dua bahasa, Aceh dan

Inggris. Karena sulit mendapatkan naskah bahasa Acehnya, disini kami hanya mengutip naskah

deklarasi tersebut dalam bahasa Inggris:

"We the people of Aceh, Sumatera, exercising our right of self determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, so hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java".

(Kami rakyat Aceh, Sumatera, melaksanakan

hak menentukan diri sendiri dan melindungi hak kesejarahan pemerintahan atas tanah air kami, dengan ini menyatakan diri merdeka dari seluruh kendali politik pemerintahan asing Jakarta dan bangsa asing Jawa) (Hasan Tiro, 1981: 24).

Yang menarik, secara ideologis organisasi GAM ini tidak menjadikan Islam sebagai

ideologinya melainkan nasionalisme Aceh. Padahal Islam, selama bertahun-tahun selalu menjadi

ideologi gerakan

pemerintahan Soekarno di era Orde lama. Selain itu keberadaan Abu Beureuh sebagai seorang

ulama sangat berpengaruh di awal-awal pendiriannya.

Yang terakhir selalu mengatakan perjuangan orang Aceh adalah untuk menegakkan syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah.

Namun ternyata, Ideologi Islam dinilai oleh Hasan Tiro kurang *marketable* (laku) di dunia

politik internasional (terutama Amerika dan Eropa)

Islam Phobia (ketakutan tanpa mendasar terhadap Islam) sementara dukungan mereka sangat

menentukan dalam memerdekakan Aceh².

Menurut Hasan Tiro, menggunakan nasionalisme Aceh dinilai lebih strategis karena dari

segi internal praktik politik Orde Baru yang otoriter dan perilaku eksploitasi ekonomi Aceh yang

melahirkan kemiskinan struktural akan memudahkan lahirnya simpati dari masyarakat (karena

nasionalisme Aceh yang menonjolkan kemakmuran dan keadilan masa lalu terutama era Sultan

Iskandar Muda akan menjadi angan-angan sosial syurgawi bagi rakyat Aceh yang

tertindas) untuk mendukung perlawanan ini dan dari segi eksternal dengan ideologi sekuler (non

agama/nasionalisme) akan memudahkan menarik simpati masyarakat internasional³³.

Mengenai nasionalisme Aceh ini, dalam bukunya "Price of Freedom",

mengatakan:

"Our fatherland, Aceh, Sumatera, had always been a free and independent sovereign State since the World begun. Holland was the first foreign power to attempt to colonialize us when it declared war against the independent Sovereign State of Aceh, on March 26 1873 and on the same day invaded our territory, aided by Javanese mercenaries.However, when, after the World War II, the Dutch East Indies was supposed to have been liquidated – an empire is not liquidated if its territorial integrity was preserved- Our fatherland, Aceh, Sumatera, was not returned to us. Instead, our fatherland was turned over by the Dutch to the Javanese – their mercenaries- by basty fiat of former colonial power. The Javanese are alien and foreign people to us Acehnese Sumatrans. We have no historic, political, cultural,

mi

² Wawancara dengan Muhibuddin, tokoh Pemuda Simpang Keuramat Aceh Utara, 19 April 2016

³ Wawancara dengan Muhammad Ali, Pemuda Buloh Blang Ara, 13 Juni 2016

economic or geographic relationship with them.....This illegal transfer of sovereignty over our fatherland by the old, Dutch Colonialists, to the new, Javanese colonialists, was done in the most appalling political fraud of the century, The Dutch colonialist was supposed to have turn the sovereignty over our fatherland to a new nation called Indonesia” (Hasan Tiro, 1981: 25-26).

Penetapan ideologi sekuler ini, pada awalnya melahirkan reaksi keras dari tokoh senior

DI/TII yang terlibat dalam pendirian awal GAM. Karena selain Islam itu dipandang sebagai

unsur utama yang dapat menjadi pemersatu gerakan, ia juga merupakan identitas sosial orang

Aceh. Namun ketika disampaikan kepada Abu

tindakan Hasan Tiro sudah tepat karena hal itu dinilainya sebagai bagian dari strategi dan taktik

perjuangan. Abu Beureueh, mengatakan: ”Itu hanya sebagai taktik yang digunakan oleh si Nyak (Nak) Hasan saja” (Abu Jihad,2000: 80).

Di lain pihak, dukungan Abu Beureueh terhadap Hasan Tiro yang sudah tercium oleh pemerintah sangat mengkhawatirkan presiden Soeharto. Karena apabila teungku dayah reformis itu dibiarkan aktif dalam GAM apalagi ia tetap berada di Aceh dipastikan gerakan itu akan dengan mudah mendapat simpati dari rakyat Aceh sebagaimana gerakan DI/TII sebelumnya di masa Orde Lama yang dipimpinnya sendiri. Sekali lagi dengan mencontoh apa yang dilakukan Belanda dalam perang Aceh yaitu memisahkan ulama dengan rakyatnya, presiden Soeharto pada tahun 1979 mengisolasi Abu Beureuh dari Aceh ke Jakarta dan untuk membatasi aktivitas fisiknya

Beureueh, yang terakhir mala

setelah berada di Jakarta mata Abu Beureueh dibutakan oleh rezim ini (Abu Jihad,2000: 80).

Di awal pendiriannya, gerakan ini langsung menghadapi tekanan yang hebat dari pemerintah Indonesia. Satu per satu pemimpin terasnya berhasil dilumpuhkan oleh aparat pemerintah. Belum genap tiga tahun usianya, wakil wali negaranya Dr. Muchtar Hasbi tewas dalam sebuah serbuan aparat TNI di Kuala Simpang. Diikuti pula oleh Menteri Sosialnya, Zubir Mahmud, Panglima II GAM wilayah Pase Ismail Ben dan terakhir tokoh yang sangat kharismatik, Teungku Ilyas Leubee ketua Dewan Syura GAM syahid ditembak aparat saat sedang melaksanakan shalat Ashar di sebuah mesjid di Pidie pada tanggal 15 April 1982 (Neta S. Pane, 2001: 54-55).

Pasca meninggalnya tokoh-tokoh teras dan

kharismatik itu, GAM relatif tidak mampu lagi menunjukkan aktivitasnya yang berarti. Mereka baru menunjukkan kembali eksistensinya, setelah para personil GAM yang dikirim Hasan Tiro berlatih militer di Kamp Tahura, Libya pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an kembali ke Aceh (M. Isa Sulaiman,2000: 56-57). Tampilah kemudian panglima-panglima GAM alumni Libya ini dalam kancah konflik Aceh seperti antara lain Teungku Abdullah Syafe'i, Muzakir Manaf, Ismail Syahputra, Muhammad Rasyid alias Ahmad Kandang, Ishak Daud, Sofyan Daud dan Arjuna.

Setelah mendapat laporan dari Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, untuk mengatasi kekacauan ini presiden Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan kode operasi, Operasi Jaring Merah (OPM), (Neta S. Pane, 2001:174-175). Perintah ini disertai dengan perintah

pengiriman pasukan yang terdiri dari 5000 orang pasukan elite yang

berasal dari Kopassus (2 batalyon), Siliwangi dan Brimob untuk menumpas pejuang GAM yang

hanya berjumlah ratusan itu (Nirzalin,2012: 359).

Dari segi internal sipil Aceh, menurut Ibrahim Hasan permintaan pemulihan keamanan

(DOM) itu merupakan tindakan yang mendapat dukungan dari banyak komponen masyarakat

dan yang terpenting adalah mendapat legitimasi politis dan ideologis dari para

Sehingga Gubernur Aceh ini merasa tindakan yang dilakukannya sudah sangat tepat. Karena

dukungan tidak hanya diperoleh dari

politik tetapi juga agamawan yang merupakan figur sakral bagi masyarakat

Ibrahim Hasan mengatakan:

”Operasi pemulihan keamanan di Aceh dalam menumpas GAM itu memperoleh legitimasi politis dan ideologis dari ulama (MUI dan teungku dayah) pernyataan dukungan itu bersama dengan berbagai kekuatan politik lainnya

dipublikasikan di harian Serambi Indonesia tanggal 30 Juni 1990” (Heri Iskandar, et.al.2000: 295).

Tindakan dukungan teungku dayah pernyataan tertulis yang dikeluarkan secara bersama lewat pertemuan resmi untuk membicarakan

realitas aktual konflik antara RI-GAM tetapi juga dilakukan lewat aktivitas simbolik seperti

peusijuek (mentepung tawari) pasukan dan alat tempur TNI/Polri dan lain sebagainya.

dukungan tertulis dinyatakan secara tegas misalnya dilakukan saat terjadinya pertemuan

(*Muzakarah*) di dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang difasilitasi oleh Teungku

Mawardiy Aly, putra Hadratus Syaikh Teungku Buya Muda Waly. Dalam pertemuan itu Teungku

aparat birokrasi militer, pabisnis dan keku
Mawardiy salah satu mudi dan
dayah tersebut yang ikut mengatakan:

”Pada pertemuan ulama se-Aceh yang diadakan pada tahun 1993. Melahirkan rekomendasi yang berisi dukungan para ulama terhadap pemerintah RI dalam memberantas separatis AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka/ sebutan terhadap tentara

Aceh

GAM). Hadir dalam pertemuan itu teungku-teungku dayah kharismatik Aceh saat ini seperti Tu Mien, Abu Kuta Krueng dan lain-lain” (Nirzalin,2012: 371).

Secara keteinggalan menyatakan dukungannya secara dilakukan oleh pemerintah dalam menumpas GAM ini. Dalam pertemuan Rapat Kerja tanggal 23 sampai 26 April 1997 misalnya salah satu tema sentral yang dibahas (*Mubahasah*) adalah tentang GPK (GAM). *Mubahasah* yang dibuka oleh Pangdam I Bukit Barisan Mayjend Sudaryanto di Banda Aceh itu diisi dengan makalah yang dipresentasikan oleh Tgk. M. Daud Zamzami (Abu Daud), Tgk.H. Usman Ali Kuta Krueng (Abu Kuta Krueng), Tgk.H.M. Amin Mahmud Blang Blahdeh (Tu Mien) dan Tgk. Ismail Yakub. Keputusan penting dari *Mubahasah* itu adalah ”Melawan, Menentang dan Melakukan makar

terhadap pemerintah yang sah kedudukannya Haram. Hukum serupa juga berlaku bagi yang memberikan bantuan dan dukungan kepada yang menentang dan melawan organisatoris, organisasi dayah pemerintah RI”(Harian *Serambi Indonesia*, tanggal 24 dan 27 April 1997). Bahkan Teungku A. Hasymy, ketua MUI Aceh menyebut GAM sebagai gerombolan dan bukan pejuang, (*Forum Keadilan*, No.01, Tahun VI, 21 April 1997).

Secara simbolik, menurut Ali Gadeung dukungan teungku dayah terhadap operasi militer ini dilakukan pula melalui *peusijuek* pasukan yang baru tiba, komandan pasukan yang sedang bertugas dan persenjataan yang digunakan dalam operasi penumpasan. Lebih lanjut Gadeung mengatakan:

”Pada masa konflik mereka (teungku dayah) sering didekati oleh militer. Setiap ada pergantian dan masuknya pasukan baru, mereka selalu dikondisikan

sebagai salah satu pihak yang menyambut serta sering diminta untuk mem-*peusjuek* pasukan, tank dan alat tempur lainnya”(Nirzalin,2012: 271).

Dukungan para teungku dayah terhadap pemerintah didasari pada argumentasi bahwa dalam realitasnya banyak korban masyarakat sipil yang timbul akibat dari gerakan perlawanan yang dimunculkan oleh GAM ini. Meskipun, bisa jadi tidak semua korban yang timbul itu akibat ulah GAM maupun TNI/Polri tetapi dilakukan oleh pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dibalik konflik yang terjadi di Aceh itu. Namun yang jelas konflik yang dipicu oleh kehadiran GAM itu telah mengakibatkan terjadinya instabilitas keamanan yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan pemerintahan serta tentu saja nyawa masyarakat yang tidak berdosa. Sehingga dalam

pandangan normatif agama, teungku dayah menilai gerakan ini lebih banyak memberi dampak *mudharat* (tidak baik/kerusakan) daripada manfaatnya.

Meskipun demikian, ada beberapa alasan mendasar lainnya mengapa dalam perlawanan Aceh terhadap Jakarta ini teungku dayah umumnya lebih memilih mendukung pemerintah daripada berpihak pada GAM. Pertama, GAM sebagaimana ditegaskan di atas secara genealogis didukung oleh para teungku dayah reformis eks aktivis DI/TII Aceh yang memiliki konsepsi dan paham keagamaan yang berbeda dengan para teungku dayah tradisional. Meskipun secara

kuantitas teungku dayah reformis sudah sangat sedikit di Aceh namun dukungan itu menjadi sangat berarti dan menciptakan perlawanan identitas dengan para teungku dayah tradisional yang mayoritas sebab dinyatakan sendiri oleh tokoh utamanya yaitu

Teungku Muhammad Daud
Beureueh.

Teungku dayah reformis menekankan pembaharuan atau modernisasi dalam pembelajaran Islam dan cara pandang dunia (*worldview*) kehidupan sosial dan politik. Sementara, teungku dayah tradisional tetap mempertahankan konsepsi tradisionalitasnya. Dalam keorganisasian Islam, kelompok teungku dayah tradisional berafiliasi kepada NU yang berpusat di Jakarta. Sementara kelompok teungku dayah reformis mendirikan sendiri organisasinya yang bernama PUSA (Persatuan Ulama Aceh) yang khas Aceh dan berkantor pusat di Aceh. Sehingga dalam pendirian GAM ini para teungku dayah tradisional sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Panton (Ketua HUDA/Himpunan Ulama Dayah) merasa tidak pernah diajak serta.

Lebih lanjut, Abu Panton mengatakan:

“Gerakan Aceh Merdeka tidak pernah mengajak dan meminta persetujuan dari teungku dayah sehingga teungku dayah tidak memberikan pernyataan secara tersurat apakah mendukung atau menolak gerakan tersebut. Sehingga dalam gerakan Aceh merdeka itu teungku dayah tidak dilibatkan dan terlibat baik dari awal gerakan maupun sampai akhir” (Nirzalin, 2012: 375).

Kedua, aktivis GAM yang direkrut pada fase kedua yaitu tahun 1989-an dan 1990-an (fase konflik yang hebat) umumnya tidak berasal dari kelompok dayah (Moch. Nurhasim, 2003: 48). Realitas ini menciptakan jarak ideologis antara teungku dayah yang menempatkan Islam sebagai titik pandang utama dari pelbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Abu Jihad, Hasan Tiro lebih mementingkan merekrut orang-orang awam daripada orang-orang pintar apalagi dari kalangan dayah yang pengetahuan agamanya kuat karena merekalah orang-orang

yang dinilai berani, siap berperang dan patuh pada pemerintahnya, sehingga mudah dalam mengatur dan memberi perintah (Abu Jihad, 2001: 153).

Ketiga, GAM pada awal pendiriannya sebagaimana yang telah disebutkan dimuka meletakkan Islam sebagai ideologi gerakan. Namun, dengan alasan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat internasional terutama Amerika dan Eropa, ideologi organisasi gerakan pembebasan ini oleh Hasan Tiro diubah menjadi nasionalisme Aceh. Perubahan ideologi dari Islam ke sekuler ini tentu mendorong bertambah minornya pandangan teungku dayah terhadap organisasi ini. Bagi yang sebelumnya tidak terlalu sinis terhadap GAM, kini ketika mereka sudah tidak lagi berpegang teguh pada ideologi GAM maka menjadi antipati dan bahkan menilainya tidak lebih sebagai gerakan yang bertujuan hanya untuk meraih kekuasaan duniawi saja.

Keempat, kuatnya dominasi kekuasaan rezim Orde Baru terhadap teungku dayah.

Operasionalisasi

dominasi dilakukan melalui dua jalur, pertama jalur wacana (struktur signifikasi) dan yang kedua jalur sinterklasisme ekonomi (struktur dominasi ekonomi). Jalur

wacana (struktur signifikasi) dilakukan melalui transformasi konsep pembangunanisme Aceh kepada teungku dayah. Rasionalisasi konsep pembangunan dan realitas sosial empiris Aceh yang

serba tertinggal dalam pelbagai sektor dengan daerah lain di Indonesia dinilai oleh teungku

dayah berkoherensi dengan konstruk konsep yang ditawarkan oleh Orde Baru.

Rasionalisasi Konsep pembangunanisme atau developmentalisme yang menitikberatkan pembangunan yang sesungguhnya pada pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan Orde Baru itu tidak

mendapat telaahan kritis dari para teungku dayah.

Yang terjadi mereka
justeru menerima

rasionalitas pembangunan ala
Orde Baru itu dan
menginternalisasinya sebagai
jawaban terhadap

pelbagai ketertinggalan Aceh
dalam ranah pembangunan.

Realitasitu terjadi didorong
oleh ketidakmampuan
teungku dayah
menawarkan

konseptualisasi pembangunan
Aceh sendiri yang
lebih mandiri.
Mereka tidak mampu

menciptakan wacana/ideologi
tandingan terhadap struktur
(negara), sehingga efeknya
mereka

justeru terserap kedalam
permainan struktur. Menurut
Imran, ketidakberdayaan teungku
dayah

melahirkan konseptualisasi
tandingan itu karena keilmuan
yang mereka geluti saat ini
telah

terspesialisasi hanya pada
keilmuan agama. Hal ini berbeda
dengan teungku dayah dahulu (era
sebelumnya) yang selain
menguasai ilmu-ilmu keagamaan
juga menguasai wacana sosial-
politik

karena mereka mempelajari kitab-
kitab kedua keilmuan tersebut.

Realitas itu ditegaskan oleh Imran,
ia mengatakan:

Masa lalu (sebelum era Orde
Baru) teungku dayah tidak hanya
mempelajari kitab-kitab agama
tetapi juga kitab-kitab tentang
ilmu-ilmu sosial. Karena itu
seorang teungku dayah di Aceh
adalah mereka yang tidak hanya
menguasai ilmu agama tetapi juga
ilmu sosial. Hal inilah yang
menyebabkan mereka disebut
berpengetahuan tinggi (*Ilmu
Manyang*). Penghormatan dan
pengaruh teungku dayah dalam
ranah sosial-politik bukan semata
faktor fanatisme masyarakat
terhadap mereka tetapi lebih
karena mereka memahami dan
menguasai masalah-masalah sosial
juga. Saat ini, teungku

dayah di Aceh hanyalah mereka
yang menguasai ilmu agama
karena kitab-kitab ilmu sosial
sudah tidak dipelajari lagi.
Lemahnya pemahaman mereka
terhadap masalah sosial membuat
mereka tidak lagi mampu
mempengaruhi realitas sosial
sekaligus mereka kehilangan
pengaruh pada wilayah ini dalam
masyarakat Aceh actual
(Nirzalin,2012: 271).

Selain itu, sinterklasisme
ekonomi yang dilakukan rezim

Orde Baru terhadap teungku dayah berhasil menciptakan ketergantungan mereka pada rezim ini. Bantuan-bantuan ekonomi secara gratis (sinterklasisme) baik dalam bentuk bantuan dayah, bantuan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang dilakukan secara intensif, secara psikologis dan sosiologis melahirkan keinginan untuk membalas “kebaikan” si pemberi bantuan itu. Dalam posisi ketergantungan dan keinginan untuk membalas budi terhadap kebaikan Orde Baru itulah yang pada akhirnya membuat teungku dayah selalu berada dalam genggaman politik rezim Soeharto ini.

Operasi Militer dan Runtuhnya Nasionalisme Indonesia

Pelaksanaan operasi militer dalam dalam realitasnya melahirkan kekerasan dan penderitaan yang tidak terbayangkan bagi masyarakat

Aceh Aceh Utara. Sementara strategi politik gerilya dan pembauran dengan masyarakat yang diterapkan oleh GAM, ternyata selain telah menyebabkan perlawanan tidak dapat dihentikan dengan seketika juga telah menyebabkan prajurit ABRI frustrasi sehingga melakukan tindakan-tindakan ”indisipliner” di lapangan⁴.

Akibatnya, pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa, penghilangan paksa, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan dan perampasan menjadi pemandangan serta cerita sehari-hari masyarakat di bumi Serambi Mekkah itu. Bila merujuk data yang diperoleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), selama operasi militer (1989-1998) dilangsungkan telah terjadi tindak kekerasan yang diantaranya menyebabkan 871 orang tewas, 550 orang hilang,

⁴ Wawancara dengan Imran Juned warga Nisam 28 Juni 2016

368 orang diperlakukan tidak manusiawi, 200 orang di siksa sangat sadis kemudian dibunuh di depan umum serta 102 wanita diperkosa (Lukman Age, 2000: 13-131).

Sikap prajurit yang brutal itu rupanya juga dipengaruhi oleh provokasi yang dilakukan oleh komandan mereka, Mayor Jenderal H. R. Pramono (Pangdam I Bukit Barisan). Jenderal bintang dua ini tidak jarang menyeru kepada masyarakat, "Pokoknya kalau ketemu GPK (sebutan resmi pemerintah untuk GAM) bunuh Saja, nggak perlu diusut". Pernyataan Pramono

itu dinilai oleh masyarakat Aceh telah mendorong serdadunya (ABRI) bertindak sewenang-wenang di lapangan sehingga banyak korban tidak berdosa berjatuh. Provokasi inilah yang melahirkan kepercayaan di masyarakat bahwa kekerasan yang terjadi terhadap penduduk sipil di Aceh tidak dapat dilepaskan dari

pimpinan ABRI dan negara. Mengikuti logika Komando yang menjadi basis paradigmatik operasionalisasi tindakan ABRI, maka suatu tindakan yang dilakukan oleh bawahan pastilah secara linear merupakan terjemahan dari perintah/kebijakan atasannya.

Kepercayaan normatif ini membuat masyarakat mengalamatkan pemerintah Orde Baru sebagai pihak yang harus dipersalahkan dan bertanggung jawab terhadap semua persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh. Akibatnya, menurut Al Chaidar, seluruh eskalasi persoalan Aceh ini menjadikan rakyat Aceh kehilangan kepercayaan kepada negara atau pemerintah pusat. Keluarga-keluarga di Aceh mulai menjadi "keluarga gerilya", dimana pun *kaphe* (kafir) atau *sipa'i* (sebutan untuk aparat Indonesia) ditemukan, maka akan ditikam secara kejam dan membabitnya. (Al Chaidar: Revolusi Aceh",

Tabloid *GAMMA*, 22 Agustus 1999)

Situasi ini pula yang mendorong orang Aceh melakukan politik pembedaan antara orang kita (*awak tanyoe*) dan orang lain (*other/liyan*) atau kita dan mereka. "kita" (*tanyoe*) ditujukan untuk seluruh orang Aceh yang bernasib sama tidak terkecuali GAM dan simpatisannya, sementara "mereka" (*liyan/other*) ditujukan kepada seluruh komponen aparatur negara Orde Baru, baik birokrasi sipil, militer maupun semua pihak yang mendukung eksistensi operasionalisasi kekuasaan represif rezim ini.

Realitas ini lalu mendorong mengalirnya air bah dukungan masyarakat yang tidak terbendung kepada GAM. Kecerdasan elite GAM yang melakukan standar ganda (*doublestandard*) dalam mensosialisasikan ideologinya, yaitu keluar Aceh (eksternal) terutama duniainternasional ideologi yang dikenalkan adalah

ideologi sekuler (non agama) yaitu nasionalisme Aceh. Sementara kepada masyarakat selalu saja ditegaskan bahwa tujuan gerakan perjuangan GAM adalah untuk mendirikan negara Islam sebagaimana pada masa Sultan Iskandar Muda, telah membuat masyarakat merasa bahwa GAM benar-benar bagian dari mereka.

Apalagi simbol-simbol Islam digunakan secara intensif oleh tokoh-tokoh GAM sehingga ideologisasi Islam sebagai basis ideologi mereka benar-benar dipercaya oleh masyarakat Aceh. Hampir semua komandan lapangan GAM menggunakan gelar sakral "teungku" sebagai sebutan nama depannya. Maka muncullah panggilan seperti Teungku Abdullah Syafe'i, Teungku

Muzakir Manaf, Teungku Ishak Daud, Teungku Sofyan Daud, Teungku Jamaika, Teungku Mansur, Teungku Muchsalmina dan lain-lain. Padahal mereka bukanlah berasal dari elite agama

sebagaimana layaknya sebutan teungku dalam tradisi masyarakat Aceh. Namun melalui panggilan teungku itu telah mendorong lahirnya suasana keakraban emosional antara masyarakat dengan GAM.

Selain itu, ada beberapa dimensi substantif lainnya yang mendorong lahirnya dukungan massif masyarakat terhadap GAM. Pertama, kekecewaan ekonomi dan politik. "Aceh adalah lumbung intan mutiara". Ungkapan tersebut bukanlah isapan jempol belaka karena realitasnya bumi Aceh mengandung berbagai macam sumber daya mineral, tambang dan hutan yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam itu telah mendorong pemerintah Orde Baru mengeruk perut bumi Aceh dengan mendirikan pelbagai macam industri tambang seperti PT. Arun.NGL.CO, MobilOil, PT. Semen Andalas Indonesia, PT. Pupuk Asean, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT Kertas

Kraft Aceh. Berdirinya perusahaan-perusahaan raksasa itu ditingkahi dengan penggusuran terhadap penduduk yang berada di area perusahaan. Banyak masyarakat di zona industri seperti Aceh Utara yang tidak menerima ganti rugi yang layak. Selain itu, sebagian besar penduduk di sekitar industri tidak terserap ke dalam industri-industri tersebut.⁵⁵

Dengan kondisi seperti itu, ditambah oleh tingkat perubahan yang menonjol di sekitar industri sementara efek positifnya bagi masyarakat kurang dirasakan, maka muncullah kecemburuan orang-orang Aceh disekitar perusahaan terhadap para pekerja yang didominasi oleh orang-orang luar Aceh. Dalam perjalanannya, kekecewaan rakyat Aceh semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pengurusan

⁵ Wawancara dengan Razali (40 Tahun), warga Ujoeng Pacu Aceh Utara, tanggal 20 Juni 2016

sumberdaya alam yang berasal dari daerah tersebut. Selain persoalan gas dan minyak bumi, pada tahun 1975 ada sekitar 20 perusahaan HPH (Hak Penguasaan Hutan) yang memperoleh ijin penebangan hutan seluas 1.059.000 hektar dengan luas areal penebangan sebesar 37.019.000 hektar per tahun. Semua pelakunya adalah orang luar sementara orang Aceh hanya menjadi penonton.

Realitas itu menegaskan, bahwa kekayaan sumber daya alam Aceh yang begitu melimpah dieksploitasi secara besar-besaran, tetapi sebaliknya rakyat Aceh tidak merasakan manfaat apa-apa. Bahkan sebagian besar rakyat Aceh hidup terbelakang dan miskin karena mereka tidak bisa menikmati pembangunan yang selama ini dilakukan. Realitas ini terjustifikasi dari hasil Survei

Sosial Ekonomi (SUSENAS) 1990 yang menunjukkan lebih dari 60 % desa di Aceh tergolong

ke dalam desa miskin. (Abdul Rahman; 2003-56)

Kedua, brutalisme serdadu Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan dimuka operasi pemulihan keamanan di Aceh tidaklah didahului dengan pendekatan dialog. Jakarta (Pemerintah Pusat) dengan ponggahnya melakukan operasi militer berdasarkan keyakinan bahwa dengan cara itulah pemberontakan dapat diselesaikan secara cepat dan efektif. Namun yang terjadi bukannya perlawanan yang terhenti, tetapi justru tindakan-tindakan represif yang bersifat membabi buta itu telah menyebabkan banyaknya jatuh korban sipil yang tidak berdosa.

Hasilnya, selain menimbulkan dendam psikologis dari para korban yang selamat dan keluarga mereka, masyarakat Aceh yang tidak ada kaitannya dengan GAM dan korban kekerasan Orde Baru pun karena merasa saudaranya diperlakukan secara tidak wajar merasa ikut terhina

dan lalu bisa ditebak kebencian massif terhadap Indonesiapun lahir sebagai kesadaran kolektif (kesadaran praktis) yang tidak dapat dibendung.

Ketiga, kedekatan GAM dan masyarakat. Posisi negara yang bersifat represif dan bahkan menjurus brutal yang dipertontonkan kepada masyarakat justru dimanfaatkan oleh GAM untuk lebih mendekatkan diri mereka dengan orang Aceh melalui sentuhan kesamaan etnik dan agama (Islam) yang disosialisasikan dan ternyata terinternalisasi dengan cepat akibat kondisionalisasi (*conditioning*) yang terbentuk melalui ulah represif negara itu. Dalam posisi ini lalu GAM mengintrodusir ide-ide kemerdekaan yang didasarkan pada kolonialisasi yang dilakukan oleh Indonesia-Jawa dan orang-orang *gampoeng* (desa) di Aceh pun menyerapnya sebagai kebenaran karena realitas yang mereka amati

dan rasakan menjustifikasi apa yang ditransfer oleh GAM itu.

Bahkan untuk menunjukkan kebersatuan, simpati dan pembelaannya kepada masyarakat, sering sekali ketika aparat militer selesai melakukan razia, mengintimidasi, apalagi ada warga sipil yang tewas maka GAM segera menuntut bela (*tueng bila*) melakukan aksi balas dengan cara menyerang dan menyergap pos-pos tentara atau brimob (Brigade Mobil) yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil Aceh itu. Tindakan GAM tersebut telah mengkonstruksikan kesadaran sublimatif masyarakat korban bahwa GAM adalah pahlawan bagi mereka (*GAM is the real hero*).

⁶⁶

Akibatnya, GAM karena mereka orang Aceh, bernasib sama (menghadapi kekerasan negara), selalu berada bersama

⁶ Wawancara dengan zakaria (39 tahun), warga matangkuli Aceh Utara Tanggal 7 Juli 2016

masyarakat dan siap melakukan aksi balas (*tueng bila*) terhadap masyarakat yang menjadi korban diletakkan sebagai "*amak droe*" atau "*amak tanyoe*" oleh karenanya dicintai seperti keluarga sendiri. Sebaliknya pemerintah Indonesia, aparaturnya dan semua elemen pendukungnya karena dikategorikan sebagai *Si Pai* mereka dibenci dan dianggap sebagai musuh bersama (*common enemy*)⁷⁷. Kebencian terhadap tindakan militeristik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini pada akhirnya mendorong runtuhnya nasionalisme Indonesia di dada para pemuda Aceh Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstruksi nasionalisme keindonesian pemuda Aceh Utara tidak terlepas dari realitas dinamika konflik yang dialami dan

diaktori oleh mereka sepanjang era Orde Baru hingga dengan paruh awal era reformasi (1976-2005). Realitasnya, tidak dapat dipungkiri perlawanan terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh sebagian pemuda Aceh Utara secara fundamental telah membentuk karakter nasionalisme keindonesiaan mereka. Nasionalisme Indonesia yang pada mulanya berkembang secara alamiah dikalangan pemuda dan masyarakat Aceh Utara pada akhirnya mengalami keruntuhan sebagai akibat dari kebijakan politik pemerintah Indonesia dibawah kendali rezim Orde Baru yang menyikapi secara militeristik terhadap reaksi protes pelbagai kebijakan politik pembangunan yang dinilai oleh masyarakat sebagai tidak adil dan berpihak pada kepentingan mereka.

Pendekatan militeristik yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya jatuh korban dipihak masyarakat sipil menyemai benih-benih kebencian terhadap

⁷⁷ Si Pai merupakan akronim dari Si Penguang Tegaknya Agama Islam, wawancara dengan Reza, mantan aktivis GAM Aceh Utara pada tanggal 10 Juli 2016

Indonesia. Gulungan kebencian bertambah besar seiring dengan situasi sosial yang penuh dengan horor, teror dan pelbagai bentuk kekerasan. Realitas ini mendasari akar runtuhnya nasionalisme keindonesiaan pemuda Aceh Utara. Keruntuhan nasionalisme keindonesiaan dikalangan pemuda Aceh Utara teridentifikasi tatkala secara massif mereka bergabung dengan organisasi yang dianggap separatis oleh pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka. Tokoh idola bangsa yang sebelumnya Soekarno dan Soeharto berganti dengan paduka yang mulia Teungku Hasan Di Tiro.

Saran

Nasionalisme sebagai sesuatu yang selalu berada dalam proses menjadi (*on going*) karena merupakan hasil bentukan sosial dalam korelasi relasional antara rakyat dengan negara, harus menjadi bagian pertimbangan utama dalam pelbagai kebijakan

yang diputuskan oleh siapapun pemimpin negara. Kebijakan-kebijakan yang abai terhadap kepentingan rakyat dan apalagi berbau kekerasan dan menindas tentu akan mendorong runtuhnya rasa nasionalisme dikalangan warga negara.

Dalam realitas nasionalisme yang dinamis ini, maka pemerintah baik pusat maupun propinsi dan kabupaten/kota terkhusus Aceh Utara harus menyikapi semua kebijakan secara arief dan bijaksana dan mengedepankan pelbagai pendekatan yang dilakukan bersifat pro rakyat dan humanis dengan pola-pola pendekatan yang bersifat persuasif dan dialogis. Bahkan dialog harus dijadikan sebagai kata kunci ketika berhadapan dengan semua persoalan yang terkait warganya, karena pada prinsipnya tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Jika dialog dikedepankan maka semua pihak

akan saling mengakomodir kepentingannya. Sehingga para pihak tidak memiliki alasan untuk memusuhi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Atkison, Paul, dkk (eds), 2001, *Hanbook of Etnography*, Sage Publication, London
Anderson, Benedict, 2002, *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Adams, Ian, 1993, *Ideologi Politik Mutkahir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, Qalam, Yogyakarta
Abercrombie, Nicholas dkk, 2010, *Kamus Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Blaikie, Norman, 2000, *Designing Social Research*, Polity Press, Cambridge
Barker, Chris, 2005, *Cultural Studies, Teori & Praktik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
Bungin, Burhan, 2008, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan*

Metodologis ke Arab Penguasaan Model Aplikasi, Rajawali Pers, Jakarta.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds), 1994, *Hanbook of Qualitative Research*, Sage Publication, London

Giddens. Antony, 1976, *New Rules of Sociological Method*, Hutchinson: London
Madjid, Nurcholish, 2001, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung
Moleong, Lexy, J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
Onghokham, 1987, *Runtuhnya Hindia Belanda*, Gramedia, Jakarta

Patji, Abdul Rachman, 2004, *Negara & Masyarakat dalam Konflik Aceh, Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Aceh*, LIPI, Jakarta

Spradley, James P, 2006, *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta

Daftar Informan

¹ Wawancara dengan Ramli Pemuda Blang Poroh Aceh Utara, 13 April 2016

² Wawancara dengan Muhibuddin, tokoh Pemuda Simpang Keuramat Aceh Utara, 19 April 2016

³ Wawancara dengan Muhammad Ali, Pemuda Buloh Blang Ara, 13 Juni 2016

⁴ Wawancara dengan Imran Juned warga Nisam 28 Juni 2016

⁵ Wawancara dengan zakaria (39 tahun), warga matangkuli Aceh

⁶ Si Pai merupakan akronim dari Si Pengangu Tegaknya Agama Islam, wawancara dengan Reza, mantan aktivis GAM Aceh Utara pada tanggal 15 Juli 2016

Utara Tanggal 7 Juli 2016